

PENGALAMAN EMPIRIS MANAJEMEN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN BOGOR¹⁾

Oleh : Drs. H. Harun Heryana MSi²⁾

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bahwa krisis yang sedang melanda negeri ini berdampak hebat terhadap segala aspek kehidupan masyarakat. Salah satu dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat adalah semakin rendahnya daya beli masyarakat terhadap komoditas bahan pangan. Sementara itu, di sisi lain kemampuan pemerintah untuk menyediakan bahan pangan secara mudah dengan harga yang terjangkau oleh sebagian besar masyarakat, menghadapi beberapa masalah dan kendala, mulai dari aspek alam, seperti : iklim, cuaca, ketepatan peramalan musim hujan atau musim kemarau, teknologi, aspek manajemen usahatani sampai kondisi kualitas petani (SDM) yang senantiasa perlu ditingkatkan.

Berbagai tindakan penanganan dan antisipasi telah dilakukan oleh pemerintah, baik tingkat pusat, propinsi, maupun tingkat kabupaten, dengan pendekatan lintas sektoral. Upaya-upaya tersebut ditujukan guna tersedianya kebutuhan pangan di tingkat masyarakat luas dengan harga yang terjangkau, melalui Mekanisme ketersediaan, distribusi dan konsumsi.

Guna lebih meningkatkan kepastian program pengembangan ketahanan pangan bagi masyarakat, maka perlu kiranya dikemukakan mengenai dasar hukum dan perundang-undangannya. Pembangunan ketahanan pangan telah sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 7 tahun 1997 tentang Pangan, bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan pangan bagi seluruh rumah tangga dalam jumlah yang cukup, mutu dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, merata serta terjangkau oleh setiap individu.

¹ Disampaikan pada acara Dialog dan Lokakarya Kebijakan dan Program Ketahanan Pangan di Era Otonomi, 2-3 Oktober 2001, Ruang Serbaguna I, Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor, Cibinong.

² Kepala Bapeda Kabupaten Bogor

Sedangkan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Bogor Tahun 2002-2006 menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Bogor, maka sektor pertanian dituntut untuk memperluas dan memantapkan jangkauan sasaran dari setiap program yang dilakukan.

Program-program ketahanan pangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi subsektor tanaman pangan yang terdapat di Kabupaten Bogor, yang meliputi tanaman padi sawah, padi ladang, kacang kedelai dan jagung. Potensi ini tersebar diseluruh wilayah kecamatan dalam Kabupaten Bogor.

Istilah ketahanan pangan (*food security*) mulai populer sejak krisis pangan dan kelaparan pada awal dekade 70-an. Pada mulanya pengertian ketahanan pangan terfokus pada kondisi pemenuhan kebutuhan pangan pokok. Selanjutnya berdasarkan kesepakatan pada *International Food Summit* dan *International Conference of Nutrition 1992* (FAO, 1997), pengertian ketahanan pangan diperluas menjadi kondisi tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang setiap saat untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Pengertian ketahanan pangan yang terakhir ini bersifat holistik dan mengandung makna yang selaras dengan paradigma baru kesehatan.

Makna yang terkandung dalam pengertian ketahanan pangan tersebut mencakup dimensi fisik pangan (ketersediaan), dimensi ekonomi (daya beli), dimensi pemenuhan kebutuhan gizi individu (dimensi gizi) dan dimensi nilai-nilai budaya dan religi (pola pangan yang sesuai untuk hidup sehat, aktif dan produktif serta halal), dimensi keamanan pangan (kesehatan), dan dimensi waktu (tersedia secara berkesinambungan).

Sementara itu Inmendagri No.4/1999 tentang pelaksanaan otonomi daerah menggariskan bahwa ketahanan pangan sebagai salah satu strategi pembangunan pertanian daerah diarahkan pada "upaya menjamin tersedianya pangan yang cukup dan terjangkau oleh masyarakat baik melalui diversifikasi pangan, intensifikasi, pembudayaan pertanian rakyat, dan kinerja lain yang dapat meningkatkan kinerja produksi pangan di daerah, serta mengakhiri ketergantungan pangan rakyat pada beras".

Sebelum lebih jauh membahas kondisi ketahanan pangan di kabupaten Bogor, terlebih dahulu akan disampaikan mengenai letak/posisi geografis kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat. Luas wilayah Kabupaten Bogor adalah 317.102 Ha terletak antara 6^o 19' sampai 6^o 47' Lintang Selatan dan 106^o 1' sampai 107^o 103' Bujur Timur. Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, Kabupaten/Kota Bekasi dan Kota Depok di sebelah Utara, kemudian dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Karawang disebelah Timur, sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Cianjur, disebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak serta ditengah-tengah terletak Kota Bogor.

Secara administratif, Kabupaten Bogor terdiri atas 425 desa/kelurahan dan 35 kecamatan dengan jumlah penduduk 3.489.096 jiwa dan keluarga miskin sebanyak 189.485 KK. Ditinjau dari segi topografi wilayah, maka wilayah Kabupaten Bogor keberadaannya sangat bervariasi, yaitu berupa daerah pegunungan di bagian Selatan, hingga daerah dataran rendah di sebelah Utara. Sungai-sungai yang ada di Kabupaten Bogor posisinya membentang dan mengalir dari daerah pegunungan di bagian Selatan ke arah Utara.

II. SITUASI DAN KONDISI KETAHANAN PANGAN DAERAH

Sebelum menjelaskan kondisi ketahanan pangan, ada baiknya kita kemukakan penyebaran pemanfaatan lahan. Pemanfaatan dan penggunaan lahan untuk sektor pertanian mencapai 48.417 ha, bangunan 41.128 ha, kebun 67.680 ha, padang rumput 820 ha, kolam 2.323 ha, hutan rakyat 16.288 ha, hutan negara 44.587 ha, perkebunan 26.505 ha dan selebihnya 69.354 ha untuk penggunaan lainnya (Propeda Kabupaten Bogor Tahun 2002-2006).

Pola pemanfaatan lahan pertanian yang cukup besar dapat mempengaruhi luas panen, produksi maupun pendapatan petani. Profil tanaman pangan menurut luas panen dan produksi pada tahun 2000 adalah sebagai berikut : (1) luas panen padi sawah 80.553 ha dengan tingkat

produksi mencapai 403.696 ton; (2) luas panen padi pada lahan kering mencapai 5.326 ha dengan tingkat produksi mencapai 13.617 ton; (3), luas panen kedelai mencapai 190 ha dengan tingkat produksi mencapai 228 ton; (4) luas panen jagung tercatat 3.632 ha dengan tingkat produksi 10.317 ton. Untuk lebih memahami potensi komoditas tanaman pangan, dapat dilihat Tabel 1.

Tabel 1. Luas Panen Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Bogor Tahun 2000

No	Komoditas	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (KU/Ha)	Produksi (TON)
1.	Padi Sawah	80.553	50,12	403.696
2.	Padi Gogo	5.326	25,22	13.017
3.	Jagung	3.632	28,41	10.318
4.	Kedelai	190	12,0	228
5.	Kacang Tanah	3.378	12,36	4.176
6.	Kacang Hijau	431	10,58	454
7.	Ubi Kayu	10.737	170,22	182.768
8.	Ubi Jalar	4.218	135,91	57.327
9.	Sayuran	8.700	123,22	107.204
10.	Buah-buahan	1.800.431 (pohon)	-	117.157

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Pertanian

Dari potensi pengembangan pertanian tanaman pangan seperti yang disebutkan di atas, perlu pula kiranya dikemukakan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor terhadap energi (kalori). Dengan demikian dapat diketahui mengenai keadaan/ status perimbangan (proporsi) pemenuhan gizi masyarakat. Pemenuhan kebutuhan energi (kalori) dari sebagian besar masyarakat Kabupaten Bogor masih tergantung kepada komoditas beras. Untuk melihat bagaimana komposisi bahan pangan dalam pemenuhan konsumsi karbohidrat (energi) di tingkat Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Tabel 2.

Dari Tabel 2. terlihat bahwa apabila dibandingkan antara kebutuhan pemenuhan energi/kalori masyarakat dengan ketersediaan bahan pangan, maka terdapat kekurangan bahan komoditas pangan. Kondisi ini merupakan masalah yang segera harus dicarikan pemecahannya.

Tabel 2. Kebutuhan Energi (Karbohidrat) Masyarakat Terhadap Komoditas Bahan Pangan di Wilayah Kabupaten Bogor

No	Komoditas	Konsumsi per kapita (kg)/ tahun	Jumlah Kebutuhan (ton)	Ketersediaan (ton)	Status Kekurangan/Kelebihan (ton)	Program/Antisipasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Beras	120	418.691,52	403.696 (padi)	-	-
2	Jagung	3,96	13.816,82	10.318	(3.498,82)	-
3	Kacang-kacangan	16,7	58.267,91	4.860	(53.407,91)	-
4	Ubi-ubian	24,48	85.413,07	240.095	154.681,93	-
5	Sayur-sayuran	65,7	229.233,61	107.204	(122.029,61)	-
6	Buah-buahan	32,0	111.651,07	117.157	5.506	-

Sumber : Berbagai Laporan (disarikan)

Catatan :

1. Jumlah penduduk yang dijadikan dasar perhitungan Jumlah Kebutuhan (kolom 4) adalah 3.489.096 jiwa
2. Untuk mendapatkan setara padi, maka jumlah kebutuhan beras dikalikan dengan kebalikan rendemen.

III. KEBIJAKAN DAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DAERAH

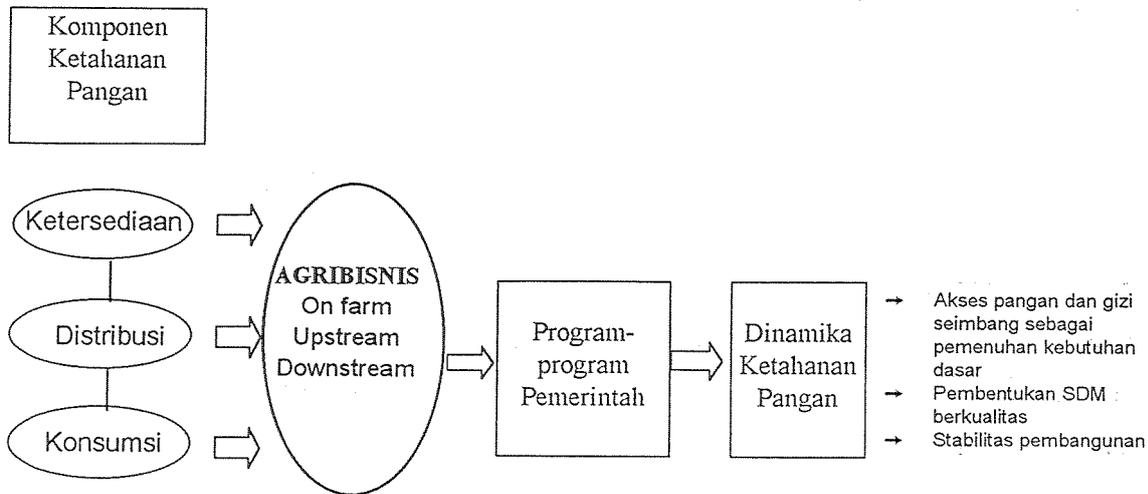
Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui strategi kebijakan penganeekaragaman pangan dalam aspek produksi, ketersediaan dan konsumsi yang didukung oleh penyempurnaan aspek kelembagaan pangan dalam arti luas dan peningkatan kapasitas para pelaku. Strategi penganeekaragaman pangan ini merupakan reorientasi penganeekaragaman pangan dari yang semula hanya terbatas pada konsumsi pangan diperluas ke dalam perencanaan produksi dan pengembangan wilayah dengan memanfaatkan potensinya untuk memproduksi komoditas pangan unggulan. Strategi kebijakan ini sekaligus merupakan strategi pemberdayaan untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian petani, meningkatkan daya tahan terhadap timbulnya keadaan rawan pangan akibat ketergantungan pada komoditas pangan tertentu dan rentannya produksi terhadap perubahan alam.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, saat ini pemerintah daerah memposisikan diri untuk memfasilitasi, regulasi dan akselerasi, agar masyarakat agribisnis sebagai aktor utama yang mengisi dan menggerakkan sistem ketahanan pangan, dapat melaksanakan fungsinya secara optimal, dalam sistem yang bersinergi, bertanggungjawab dan berkeadilan.

Landasan yang mendasari kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengembangan ketahanan pangan adalah bertumpu pada komponen sistem ketahanan pangan, yaitu subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi, yang tidak lain adalah kegiatan usaha berbasis pertanian. Berdasarkan hal tersebut maka pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan pendekatan sistem agribisnis, yang merupakan rangkaian yang terintegrasi antara kegiatan hulu (*upstream agribusiness*), kegiatan usahatani (*on-farm agribusiness*), kegiatan hilir (*down stream agribusiness*) dan kegiatan penunjang.

Ketahanan pangan memiliki beberapa perspektif pembangunan yang sangat besar, yaitu (a) akses pangan dan gizi yang seimbang sebagai pemenuhan kebutuhan dasar merupakan hak yang paling asasi bagi manusia, (b) keberhasilan dalam proses pembentukan sumber daya manusia berkualitas terletak pada keberhasilan memenuhi kecukupan pangan dan perbaikan pola konsumsi, dan (c) ketahanan pangan merupakan unsur strategis dalam pembangunan karena tidak hanya mempunyai arti fisik biologis tetapi mempunyai arti penting dalam pembangunan ketahanan ekonomi dan politik.

Untuk lebih jelasnya, tentang kerangka landasan kebijakan ketahanan pangan, maka dapat diperhatikan gambar sebagai berikut.



Sumber : Hasil Analisis, 2001

Gambar 1. Kerangka Kebijakan Ketahanan Pangan

Dalam rangka mengimplementasikan strategi kebijakan di atas, Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan beberapa langkah guna mengembangkan kebutuhan pangan di tingkat masyarakat, melalui beberapa program, yaitu :

❑ Program Pembangunan Tanaman Pangan

Program ini dijabarkan ke dalam program pokok

1. Pengembangan Ketahanan Pangan
2. Pengembangan Agribisnis

ad. 1. Pengembangan Ketahanan Pangan merupakan pengembangan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya alam, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin ketersediaan pangan dan nutrisi dalam jumlah yang dibutuhkan dan mutu yang baik.

Yang perlu diperhatikan dalam pengembangan Ketahanan Pangan:

- a. Pertimbangan dalam menerapkan peningkatan pangan sebagai fokus kebijaksanaan operasional, yaitu :
 - Sektor pertanian bertanggung jawab untuk menyediakan pangan yang bermutu dan jumlah yang cukup bagi masyarakat.
 - Jumlah penduduk yang terus bertambah 1,6% pertahun dengan konsumsi pokok terkonsentrasi pada beras, menyebabkan kebutuhan beras nasional sangat besar sedangkan kondisi sumber daya lahan semakin terbatas.

- b. Faktor yang terpenting dalam upaya peningkatan produksi adalah dititikberatkan pada kemampuan petani untuk melaksanakan usaha pertanian dengan berwawasan Agribisnis. Aspek pemberdayaan petani merupakan persyaratan partisipasi petani dalam :
 - Upaya yang dilaksanakan melalui pelayanan, bimbingan pelatihan dan penyuluhan yang memadai serta penyediaan sarana produksi, dukungan organisasi dan koordinasi diberbagai tingkat kelembagaan pemerintah, kelembagaan masyarakat pedesaan kredit usaha tani.
 - Disamping peningkatan produksi beras, ketahanan pangan akan diimbangi dengan upaya mengembangkan pangan pokok alternatif untuk menekan laju pertumbuhan konsumsi beras.
 - Penganekaragaman pangan yang dilaksanakan melalui pemanfaatan pekarangan, pengembangan produk-produk pangan lokal dengan memasyarakatkan jenis-jenis tanaman pangan alternatif yang sudah tidak asing lagi di daerah tertentu.
 - Upaya diversifikasi pengadaan bahan pokok domestik, intensifikasi pemanfaatan lahan, ekstensifikasi lahan, serta efisiensi pemanfaatan air dan perairan.

ad. 2. Pengembangan Agribisnis dimulai dari sub sistem budidaya, sub sistem penyediaan sarana produksi termasuk industri pembenihan yang tangguh, sub sistem pasca panen dan agroindustri, subsistem pemasaran serta sub sistem pendukungnya.

Untuk mengetahui nilai tambah, produk pertanian dikembangkan secara terpadu mencakup kaitannya kedepan yaitu sektor-sektor agroindustri, perdagangan dan jasa sedangkan kaitan kebelakang yaitu sektor industri yang didukung dari berbagai input pertanian. Produk pertanian yang dikembangkan harus berorientasi pasar sebagai dasar acuan untuk mengembangkan suatu komoditas termasuk kaitannya dengan kegiatannya selanjutnya. Dalam proses pengolahan, proses produksi dan penyesuaian input produksinya.

Untuk meningkatkan daya saing harus diupayakan penerapan teknologi yang tepat untuk mencapai efisiensi yang tinggi, kalau perlu dengan penerapan teknologi padat modal sesuai dengan ciri pertanian modern.

Pelaksanaan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Melalui :

1. Diversifikasi
2. Intensifikasi

- **Diversifikasi**

Dewasa ini dikenal adanya Diversifikasi Vertikal dan Diversifikasi Horizontal.

Diversifikasi Vertikal diartikan dimana proses penanganan komoditi dilakukan secara tuntas dari prapanen sampai pasca panen dan pemasarannya, dengan demikian terdapat keterpaduan produksi, pengolahan hasil dan pemasaran.

Diversifikasi Horizontal diartikan penganekaragaman komoditi pada lahan usahatani atau antar wilayah, jadi diversifikasi horizontal lebih terkait dengan pengembangan pola tanam. Salah satu upaya diversifikasi adalah pengembangan agribisnis, dan melalui

kegiatan ini diharapkan petani/khalayak lain sebagai produsen tidak hanya menguasai dan mempraktekan teknologi pertanian saja tetapi juga menguasai dan mempraktekan teknologi panen dan pasca panen.

- **Intensifikasi**

Intensifikasi pertanian adalah upaya penerapan teknologi pertanian didalam penyelenggaraan usahatani untuk meningkatkan produktifitas dan peningkatan pendapatan petani dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dengan pokok-pokok kebijaksanaan pelaksanaan intensifikasi antara lain :

1. Intensifikasi pertanian dilaksanakan disemua wilayah/lahan usahatani baik lahan sawah, lahan kering, pekarangan maupun aspek-aspek yang memungkinkan diterapkannya anjuran intensifikasi.
2. Mutu intensifikasi yang ditingkatkan melalui penyaluran teknologi hemat lahan untuk mewujudkan produktifitas yang tinggi dengan didukung oleh adanya :
 - Pengaturan pola usahatani, pola tanam dan pola komoditi
 - Bimbingan Intensifikasi Pertanian
3. Intensifikasi Pertanian dilaksanakan melalui pendekatan kelompok tani dengan pembinaan diarahkan agar petani/kelompok tani menerapkan teknologi anjuran dan komoditi usahatannya.
4. Intensifikasi Pertanian yang diprogramkan di Kabupaten Bogor adalah padi, palawija, sayuran melalui Supra Insus, Insus dan Imun.

- **Pencapaian Target Produksi**

- Dalam upaya pencapaian produksi, salah satu cara dengan penggunaan varietas potensi sedang dan varietas potensi tinggi
- Penggunaan pupuk
Sesuai dengan paket teknologi yang dianjurkan, pupuk merupakan sarana produksi yang penting disamping benih. Ketersediaan pupuk secara lokal akan sangat

membantu pelaksanaan usahatani. Untuk tahun 2000 penyaluran pupuk tidak dilaksanakan melalui mekanisme kelembagaan pemerintah akan tetapi langsung diserahkan kepada pasar.

a) Program Peningkatan Diversifikasi Pangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan diversifikasi pangan yang mencakup aspek produksi, ketersediaan dan konsumsi dengan mengutamakan peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas serta perbaikan konsumsi pangan di tingkat rumah tangga dalam rangka mencapai skor mutu Pola Pangan Harapan (PPH) yang makin baik. Melalui program pembangunan ini diharapkan akan dicapai :

- a. Peningkatan usaha dan produksi pangan serta substitusi pangan impor
- b. Terpeliharanya tingkat produksi beras yang optimal
- c. Berkembangnya jenis pangan dan pangan olahan bergizi yang berbahan baku sumber pangan lokal
- d. Meningkatnya konsumsi energi menuju angka kecukupan
- e. Meningkatnya skor mutu PPH
- f. Berkurangnya jumlah keluarga rawan pangan dan gizi
- g. Meningkatnya nilai tukar petani bersamaan dengan menurunnya perlindungan komoditi pangan

Arah kegiatan program sebagai berikut :

- a. Inventarisasi dan evaluasi sumber daya pangan potensial yang dimiliki
- b. Pengembangan produksi pangan dengan mengutamakan pada peningkatan produksi pangan hewani, sayuran dan buah-buahan dan peningkatan produksi substitusi/alternatif bahan pangan impor dengan memanfaatkan produksi lokal
- c. Pemberdayaan petani marginal dalam kerangka penganekaragaman pangan melalui peningkatan akses kepada modal, teknologi, bibit/benih dan pasar

- d. Pelatihan, penyuluhan dan diseminasi inovasi/teknologi kepada petani serta pengusaha kecil/menengah dan koperasi dalam kerangka pengembangan sistem agribisnis-agroindustri pangan
- e. Peningkatan produksi dan mutu benih/bibit unggulan yang didukung oleh inovasi dan pengembangan teknologi
- f. Peningkatan produktivitas pada kawasan yang secara ekonomi potensial
- g. Peningkatan efisiensi sistem produksi, pengolahan dan distribusi komoditas pangan
- h. Sosialisasi pola konsumsi gizi seimbang (sehat) dan lebih memperluas gerakan kecintaan terhadap makanan Indonesia
- i. Mengembangkan kewirausahaan peternakan dan perikanan rakyat
- j. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha peternakan yang berwawasan agribisnis
- k. Optimalisasi pemberdayaan stasiun pembibitan ternak dan RPH pemerintah
- l. Pengawasan dan pembinaan kesehatan masyarakat veteriner dan lingkungan
- m. Pembinaan mutu hasil peternakan dan perikanan

Untuk mencapai harapan-harapan tersebut di atas, dilakukan Program Diversifikasi Pangan dan Gizi, meliputi :

- a. Peningkatan penganekaragaman jenis tanaman dan produktivitas pertanian untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat
- b. Peningkatan produktivitas jenis tanaman pangan yang masih impor dari luar negeri melalui cara penanaman dan pembibitan
- c. Program pengembangan sumberdaya dan prasarana pertanian
- d. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (petani) melalui penyuluhan pertanian dan studi banding
- e. Pengelolaan sumberdaya alam (lahan) baik pra panen maupun pasca panen

- f. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang pengembangan produktivitas pertanian (pembangunan jaringan jalan, KUD, Bulog, gudang pusat pengolahan hasil pertanian dan lain-lain) sehingga diharapkan terjadi peningkatan kualitas produktivitas pertanian

b) Program Pengembangan Kelembagaan Pangan

Program ini bertujuan menyempurnakan serta mengembangkan kelembagaan pangan dalam rangka menjamin peningkatan produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan yang lebih beragam serta meningkatkan efektifitas pelaksanaan. Sasaran yang dicapai yaitu :

- a. Terselenggaranya kelembagaan pangan yang mantap dengan berbasis partisipasi dan kemandirian masyarakat
- b. Terselenggaranya iklim usaha pangan yang menjamin ketersediaan dan keamanan pangan

Untuk itu kegiatan program ini harus diarahkan pada :

- a. Peningkatan iklim usaha dan investasi serta insentif untuk menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi, berkembangnya lembaga pengembang teknologi, tumbuh kembangnya industri benih dan bibit serta industri pengolahan pangan berskala investasi kecil dan menengah
- b. Peningkatan efektifitas sistem pemantauan ketahanan pangan pada setiap tingkatan melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)
- c. Pengembangan pengelolaan stok pangan khususnya oleh masyarakat, termasuk mengembangkan kembali lumbung desa
- d. Penegakan hukum terutama dalam memanfaatkan dan melestarikan sumber daya hayati yang merupakan sumber genetik bagi pengembangan produksi pangan
- e. Koordinasi kebijakan dan program ketahanan pangan di setiap tingkatan dengan partisipasi masyarakat, termasuk sosialisasi Undang-undang budidaya tanaman
- f. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pangan
- g. Pembinaan kelembagaan tani dan bimbingan aplikasi teknologi
- h. Pemberdayaan keterpaduan program pertanian

Program-program yang dilaksanakan adalah Program Pertanian Rakyat Terpadu, meliputi :

- a. Peningkatan mutu intensifikasi
- b. Perkembangan diversifikasi tanaman
- c. Peningkatan produksi hortikultura dan pemenuhan gizi
- d. Peningkatan keterampilan aparat melalui bimbingan penyuluhan dan pelatihan
- e. Peningkatan keterampilan aparat melalui pelatihan dan pendidikan
- f. Pengembangan data statistik tanaman pangan terutama ditujukan untuk perencanaan masa depan
- g. Pengembangan sarana dan prasarana bagi aparatur
- h. Pengadaan sarana mobilitas pendukung kegiatan aparatur
- i. Program pembangunan Usaha Pertanian (Agribisnis), meliputi :
 - Pembentukan kawasan pertanian yang dikelola secara efektif dan efisien
 - Mengelola kawasan pertanian dilakukan dengan metode yang modern, sehingga hasil produksinya mempunyai jangkauan jual yang baik, sehingga mampu bersaing di pasaran
 - Terjadinya hubungan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan antara petani dengan konsumen (pengguna hasil produksi pertanian)
 - Tersedianya pasar dan kegiatan penggunaan hasil pertanian tersebut, sehingga semua hasil produksi pertanian dapat terjual dan terpakai
 - Timbulnya/terdapatnya sektor kegiatan lainnya yang dapat menunjang usaha pertanian

IV. KOORDINASI ANTAR SEKTOR

Ketahanan Pangan dapat digambarkan sebagai suatu sistem, yang terdiri dari tiga sub sistem yang saling berinteraksi, yaitu sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi. Pembangunan ketahanan pangan memerlukan harmonisasi dari pembangunan ketiga sub sistem tersebut. Pembangunan sub sistem ketersediaan pangan diarahkan untuk mengatur kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan yang berasal dari produksi, cadangan dan impor. Pembangunan sub sistem distribusi bertujuan untuk menjamin aksesibilitas pangan dan menjamin stabilitas harga pangan strategis dan pembangunan subsistem konsumsi bertujuan untuk menjamin agar setiap warga mengkonsumsi pangan dalam jumlah dan gizi yang cukup, aman dan beragam.

Keberhasilan pembangunan ketiga sub sistem ketahanan pangan tersebut perlu didukung oleh faktor-faktor input berupa sarana, prasarana dan kelembagaan produksi, distribusi, pemasaran, pengolahan dan sebagainya. Di samping itu perlu juga didukung oleh faktor-faktor penunjang seperti kebijakan, peraturan, pembinaan dan pengawasan pangan. Ketahanan pangan diselenggarakan oleh banyak pelaku (*Stakeholder*) seperti produsen, pengolah, pemasar dan konsumen yang dibina oleh berbagai institusi sektoral, sub sektoral serta dipengaruhi interaksi lintas wilayah.

Dalam rangka memantapkan ketahanan pangan di kabupaten Bogor, mutlak diperlukan secara sinergis peran serta instansi-instansi dengan mengaktifkan sektor-sektor yang ditanganinya. Salah satu program yang menuntut koordinasi antar instansi adalah Program SKPG atau sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Beberapa instansi yang dimaksud diantaranya adalah Dinas Kesehatan lebih banyak mengurus pemantapan nilai gizi komoditas pangan, ketersediaan pangan di masyarakat merupakan tanggung jawab Dinas Pertanian, inventarisasi sasaran SKPG yang terdiri dari KS dan pra-KS merupakan tugas dari BKKBN. Sementara itu keterlibatan PKK lebih ditujukan kepada pemantapan konsumsi keluarga yang tidak bertumpu pada komoditas beras, namun diragamkan dengan komoditas singkong, ubi jalar, talas dn sebagainya dengan standar gizi yang memadai.

Sistem kewaspadaan pangan dan gizi mengartikan bahwa ketersediaan pangan dengan kualitas gizi yang memadai di tingkat masyarakat, merupakan aspek yang harus mendapat perhatian pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan beberapa instansi terkait yang menjadi ujung tombak program tersebut.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa program SKPG sangat membutuhkan kerjasama dan koordinasi antara sektor-sektor pembangunan. Koordinasi yang selama ini telah terjalin adalah melibatkan institusi-institusi yang berkaitan dengan penyediaan sarana produksi pertanian, proses produksi usahatani dan aspek pemasaran hasil produksi pertanian (On/Off Farm Coordination).

V. PELUANG, TANTANGAN MASALAH DAN SARAN

Dalam struktur perekonomian Indonesia (terlebih di Kabupaten Bogor), pertanian pangan khususnya beras memegang peranan penting sebagai bahan makanan pokok penduduk. Oleh karena itu, kegagalan dalam memenuhi kebutuhan pokok akan dapat menggoyahkan ketahanan nasional. Demikian juga ketergantungan pada impor untuk memenuhi pangan khususnya beras dalam negeri, akan melemahkan kondisi ketahanan nasional.

Berdasarkan situasi dan kondisi komoditas pangan di Kabupaten Bogor, pelaksanaan kebijakan/program yang bertujuan untuk mendukung/menunjang ketahanan pangan, serta adanya koordinasi antar sektor-sektor pembangunan, telah melahirkan beberapa peluang, tantangan, masalah serta beberapa hal yang harus dilakukan sebagai saran bagi peningkatan dan pemantapan program ketahanan pangan di Kabupaten Bogor.

Permasalahan yang dihadapi :

- a. Belum adanya Sistem Informasi Ketahanan Pangan seperti produksi, ketersediaan, konsumsi dan harga pangan
- b. Masih rendahnya produktivitas dan kualitas pertanian
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan mutu dan gizi pangan
- d. Rendahnya pendapatan masyarakat
- e. Sempitnya kepemilikan lahan
- f. Rendahnya permodalan petani dalam meningkatkan pembangunan ketahanan pangan
- g. Rendahnya tingkat konsumsi protein hewani 3,2 gr/kap/hari, (standar nasional 6,0 gr/kap/hari), dan konsumsi ikan sebesar 14,50 kg/kap/hari (standar nasional 26,5 kg/kap/hari).
- h. Masih adanya Desa di Kabupaten Bogor yang mengalami resiko krisis pangan dan gizi.

Tantangan yang dihadapi

Tantangan besar yang dihadapi Kabupaten Bogor dalam pembangunan pertanian selama lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Produksi

- a) Adanya perubahan fungsi lahan pertanian produktif ke lahan non pertanian.
- b) Belum meratanya tingkat penerapan teknologi pertanian pada areal Intensifikasi khususnya intensifikasi padi dan palawija.
- c) Khusus pada komoditi jagung dan kedele, petani pada umumnya melaksanakan panen muda. Produksi panen muda ini tidak dapat diikutsertakan dalam perhitungan pencapaian sasaran produksi.
- d) Laju peningkatan produksi belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk

2. Pembenihan

Dilihat dari varietas komoditi tanaman pangan yang diusahakan petani pada umumnya telah menggunakan varietas anjuran, akan tetapi mutu benih yang digunakan belum seluruhnya sesuai dengan standar mutu benih berlabel/bersertifikasi.

3. Institusi pembenihan yang ada belum mampu melayani kebutuhan petani **Tingkat kemampuan dan kelembagaan tani**

Tingkat kemampuan petani baik dalam pemilihan modal maupun pengetahuan keterampilan dalam mengadopsi teknologi umumnya masih rendah. Hubungan melembaga antara kelompok tani dengan lembaga ekonomi seperti KUD dan Bank perlu ditingkatkan kemitraannya.

4. Pemasaran Hasil

Mata rantai tata niaga komoditi tanaman pangan masih panjang serta fluktuasi harga yang cukup tajam.

Peluang yang Tersedia

- Tipe lahan, geologi dan tofografi Kabupaten Bogor sangat cocok untuk usaha tani tanaman pangan.
- DKI Jakarta yang letaknya berbatasan dengan Kabupaten Bogor merupakan pasar potensial untuk hasil pertanian.
- Upaya peningkatan produksi pertanian dititikberatkan pada usaha pokok diversifikasi, peningkatan mutu intensifikasi pada lahan pertanian yang masih tersedia, baik lahan sawah maupun lahan kering.

S a r a n

1. Diperlukan pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan yang lebih cepat dan akurat sesuai perkembangan teknologi informasi saat ini.
2. Perlu ditingkatkan nilai kepedulian, gotong royong diantara masyarakat dalam penanganan kerawanan ketahanan pangan.
3. Diperlukan kelembagaan agribisnis yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.
4. Perlu diberikan pengetahuan gizi yang baik kepada masyarakat dalam upaya membangun ketahanan pangan.
5. Perlu diberikan subsidi kepada masyarakat untuk penyediaan bibit dan pupuk.
6. Perlu adanya suatu program untuk pemberdayaan masyarakat menuju ketahanan pangan yang melibatkan berbagai pihak.
7. Perlu ditingkatkan kerja sama Pemerintah dan swasta dalam hal ini pemilik modal untuk meningkatkan permodalan masyarakat.

Tabel 3. Realisasi produksi Tahun 2000 per cabang usaha

No	Cabang usaha	Realisasi (Ton)
1.	Kolam Air Tenang	4.300,32
2.	Kolam Air Deras	1.595,75
3.	Sawah Perikanan	1.005,08
4.	Karamba	68,74
5.	Jaring Apung	65,94
6.	Perairan Umum	264,55

Tabel 4. Produksi Daging dan Susu di Kabupaten Bogor Tahun 2000

No	Daging/Susu	Jumlah
1.	S a p I	2.772.675 Kg.
2.	Kerbau	267.592 Kg.
3.	Kambing	259.886 Kg.
4.	Domba	941.138 Kg.
5.	Ayam Buras	2.053.332 Kg.
6.	I t i k	32.947 Kg.
7.	Ayam Ras Pedaging	24.224.475 Kg.
8.	Ayam Ras Petelur	1.067.313 Kg.
9.	S u s u	7.977.633 Liter

Tabel 5. Produksi Telur Kabupaten Bogor Tahun 2000

No	Daging/Susu	Jumlah
1.	Ayam Buras	1.029,393 Kg.
2.	Ayam Ras	27.109,216 Kg.
3.	Itik	533.963 Kg.